



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2019

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Jakarta, Maret 2018

Arti Penting dan Strategis Tahun 2019

Tahun 2019 adalah tahun politik, sehingga berimplikasi pada arah kebijakan dan penentuan program, kegiatan, dan anggaran

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir
PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019, sebagai:

- Penjabaran dari visi dan misi Presiden.
- Rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari RPJPN 2005-2025.
- Pelaksanaan konsistensi arah pembangunan nasional.



Pelaksanaan **PEMILU SERENTAK 2019**:

- Pemilihan Legislatif (Pileg) Anggota DPR Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
- Pemilihan presiden (Pilpres).

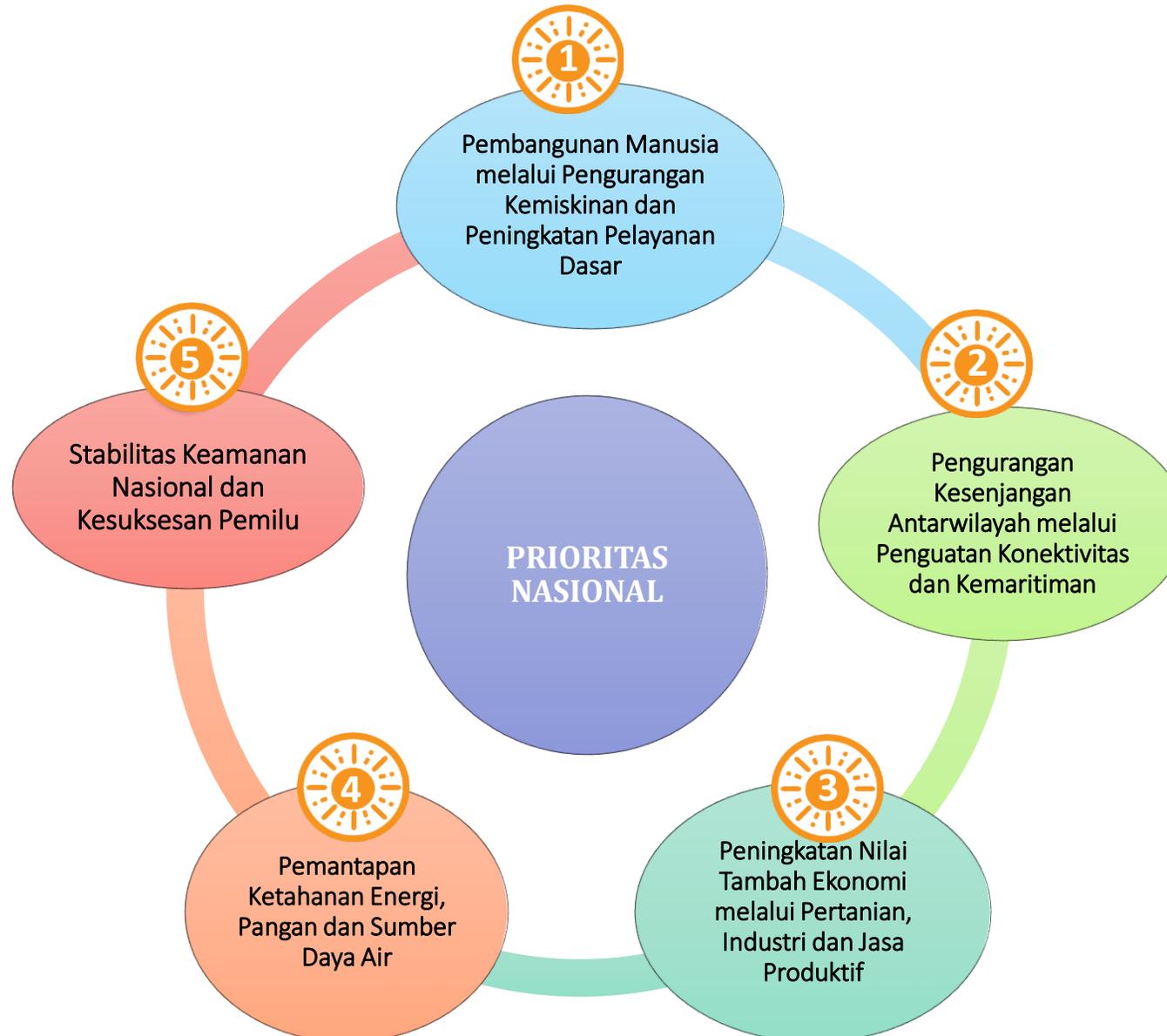


RAPBN sebagai implementasi kebijakan fiskal dirancang dengan:

- mempertimbangkan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik;
- memperhitungkan risiko, tantangan dan masalah yang tengah dan akan dihadapi ke depan; dan
- memerhatikan outlook dan pencapaian sasaran RPJMN.



Indikator	2014* (Baseline)	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	meningkat
EKONOMI		
Ekonomi Makro		
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	8 %
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010	43.325	71.975
▪ PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000	40.785	
▪ Inflasi	7,3%	3,5%
▪ Tingkat Kemiskinan	11,25% **	5-6%
▪ Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010	11,4%	16%
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94%	4-5%



Arah Kebijakan Fiskal 2019

TEMA RKP 2019

Pemerataan
Pembangunan
untuk Pertumbuhan
Berkualitas

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2019

Memantapkan
Kebijakan Fiskal untuk
Mendorong Investasi
dalam rangka
Mewujudkan
Pertumbuhan yang
Berkualitas

FOKUS KEBIJAKAN FISKAL

1. Menjaga Kesehatan Fiskal

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Produktif | 3. Daya Tahan |
| 2. Efisien | 4. <i>Sustainable</i> |

2. Kebijakan Fiskal Mendorong Iklim Investasi

- To Help:** Simplifikasi dan kemudahan investasi;
- To Serve:** Peningkatan kualitas layanan publik;
- To Support:** Pemberian insentif fiskal untuk daya saing.

Strategi Makro Fiskal 2019

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, outlook 2018 dan arah kebijakan fiskal jangka menengah

1 Outlook 2018

- Berbasis kinerja perekonomian terkini dan APBN realisasi 2017;
- Proyeksi Asumsi Makro 2018;
- Analisis risiko APBN 2018.

STRATEGI 2019



2 Tahun Politik 2019

- Fokus program perlindungan sosial dan padat karya;
- Melanjutkan infrastruktur
- Penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

EKSPANSIF

TERARAH DAN TERUKUR

1. Defisit semakin menurun (2,0-1,7)% PDB;
2. *Primary balance* menuju positif (0,4)-0,05 % PDB;
3. *Debt Ratio* 28,9-29,3% PDB

A MOBILISASI PENDAPATAN YANG REALISTIS

Optimalisasi yang realistis:

1. Menjaga peningkatan trend *Tax Ratio*;
2. Penguatan pengelolaan SDA dan aset;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B

PENAJAMAN BELANJA AGAR LEBIH PRODUKTIF

Memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non-prioritas (belanja barang dan subsidi tepat sasaran serta sinergi antara K/L menghindari duplikasi);
2. Efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi (akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi antar program yang relevan);
3. Penguatan kualitas belanja produktif dan prioritas (penajaman untuk penguatan sektor kunci);
4. Penguatan kualitas pengelolaan TKDD untuk akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan;
5. Antisipasi ketidakpastian dan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

C

PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DAN KREATIF

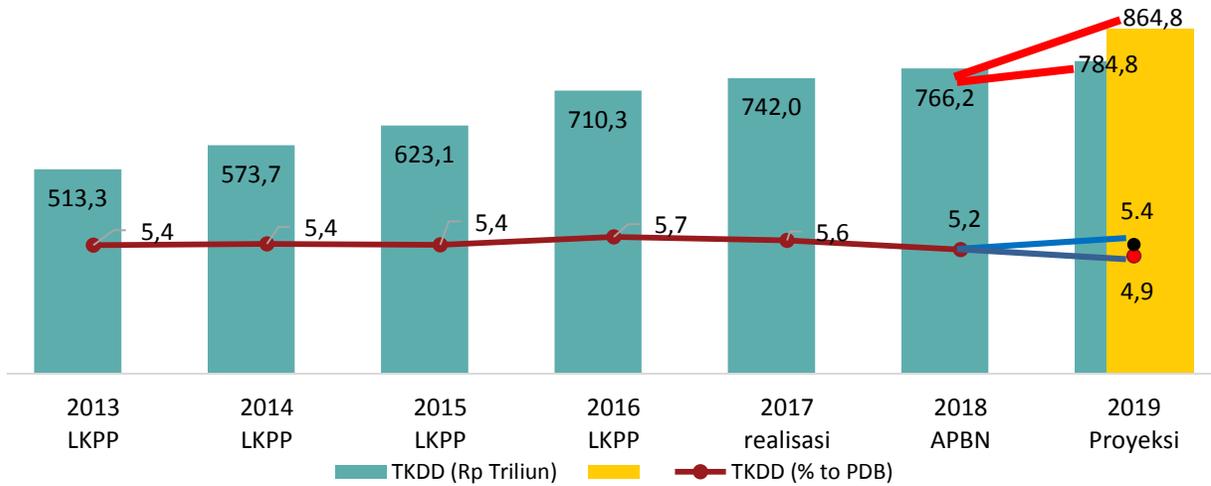
Terobosan pembiayaan yang inovatif:

1. Defisit dan Rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah;
2. Keseimbangan primer menuju positif;
3. Mengembangkan pembiayaan kreatif.

Untuk Indonesia yang Lebih Baik

PENGUATAN KUALITAS PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Alokasi TKDD yang semakin meningkat perlu diikuti dengan perbaikan distribusi dan kualitas pemanfaatan di daerah



Alokasi TKDD 2013-2018

- TKDD cenderung meningkat dengan pertumbuhan rerata per tahun 8,3%.
- Besaran TKDD relatif terhadap PDB cenderung menurun → 2013: 5,4% ; 2018: 5,2%.
- TKDD merupakan instrumen utama pendanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal → 2013-2017 secara rerata per tahun TKDD mendanai 70,5% total belanja APBD.

Perkiraan alokasi 2019

4,9% - 5,4% dari PDB

Perkiraan PDB TA 2019

Rp16.000 Triliun

Tantangan Pengelolaan TKDD

- 1 Keselarasan alokasi dengan kemampuan keuangan negara
- 2 Minimalisasi tumpang tindih pendanaan dengan belanja K/L
- 3 Pemanfaatan TKDD oleh daerah secara optimal
- 4 Menjaga stabilitas tahun politik 2019

ARAH KEBIJAKAN TKDD 2019

Pengalokasian dan pengaturan TKDD yang mendorong penggunaan belanja Daerah secara efektif dan efisien, memegang prinsip *value for money* dan sinergi antar belanja pusat dan daerah.

Penguatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (proporsional dan sinkron)

Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU)

- pengalokasian DAU sesuai kemampuan keuangan negara dan berdasarkan realisasi penerimaan negara
- pengaturan untuk infrastruktur daerah (25%) dan pemenuhan anggaran yang bersifat *mandatory*
- transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH

Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK)

- pengurangan kesenjangan layanan publik dasar antardaerah
- sinkronisasi perencanaan DAK
- peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Nonfisik
- penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*

Penguatan pengelolaan DID, Otsus, dan Dais Yogyakarta

- penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD
- efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D. I. Yogyakarta

Penguatan pengelolaan Dana Desa

- distribusi DD yang adil dan merata serta fokus pada pengentasan kemiskinan desa
- peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan DD untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi
- peningkatan alokasi dalam APBN hingga 10% dari TKD

yang l

Arah Kebijakan DAK TA 2019

1. Mempertajam **sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL**, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (*double funding*) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan.
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan **mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA** (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
3. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan **berbasis usulan daerah (Proposal Based)**;
4. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil Presiden;
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan **pendekatan program (programmatic approach)** untuk program penanggulangan *Stunting*.



Bidang DAK Fisik Tahun 2019

**hasil Rapat Pimpinan Bappenas pada 15 Januari 2018*

No	DAK Reguler 2018	Usulan DAK Reguler 2019	DAK Afirmasi 2018	Usulan DAK Afirmasi 2019	DAK Penugasan 2018	Usulan DAK Penugasan 2019
1	Pendidikan	Pendidikan	Air Minum	Air Minum	Air Minum	Air Minum
2	Kesehatan dan KB	Kesehatan dan KB	Kesehatan dan KB	Kesehatan	Irigasi	Irigasi
3	Jalan	Jalan	Pendidikan	Pendidikan	Jalan	Jalan
4	Air Minum	Air Minum	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Kesehatan	Kesehatan
5	Sanitasi	Sanitasi	Sanitasi	Sanitasi	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	Transportasi	Transportasi	Pasar	Pasar
8	Industri kecil dan Menengah	Industri kecil dan Menengah			Pendidikan	Pendidikan
9	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan			Sanitasi	Sanitasi
11	Pertanian	Pertanian			Energi Skala Kecil	Pariwisata
10	Pariwisata	Pariwisata				
11	Pasar	Energi Skala Kecil				

✓ *Tidak ada penambahan bidang DAK 2019, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangan kesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019*

✓ *Penambahan subbidang baru di bawah bidang Pendidikan untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dan Perpustakaan Daerah.*



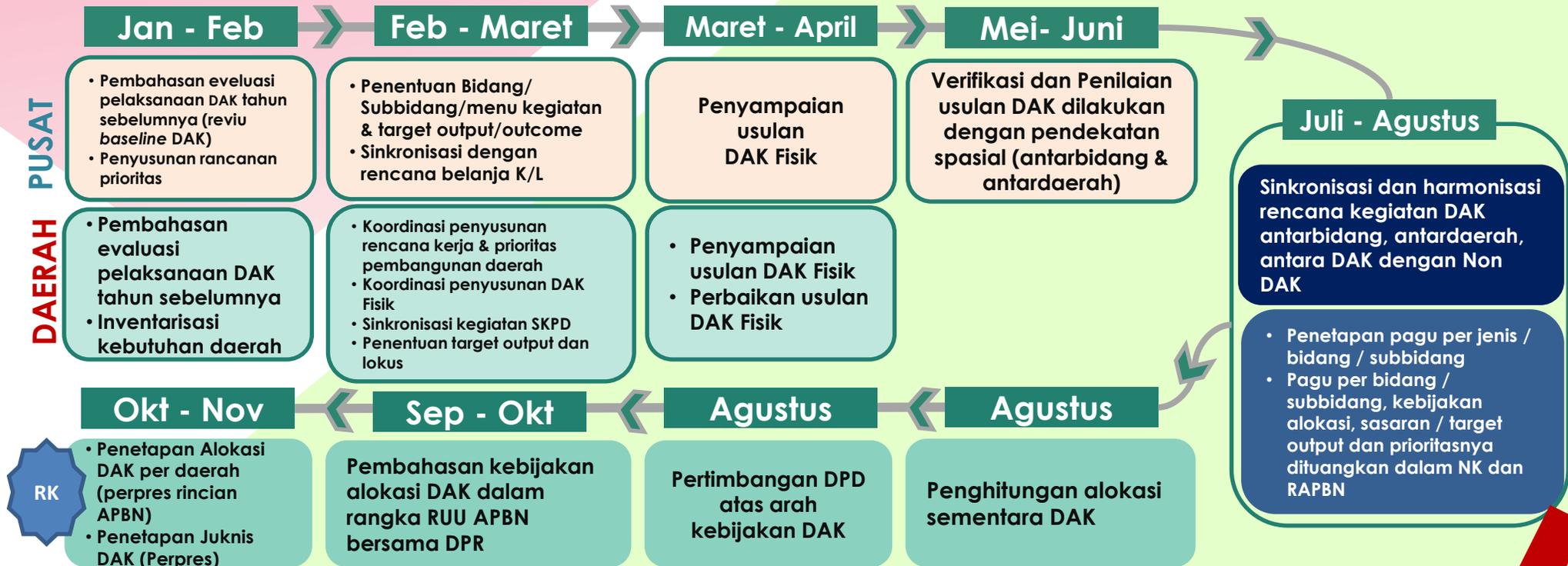
Beberapa Pertimbangan

1. Merupakan periode **pemerintahan terakhir Kabinet Kerja** (2015-2019);
2. Restrukturisasi keseluruhan DAK lebih tepat dilaksanakan pada **periode RPJMN 2020-2025** setelah mengetahui **capaian dan dampak dari DAK tahun 2018 – 2019 (efektivitas kebijakan)**;
3. DAK 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan **pengusulan online** melalui aplikasi **e-planning DAK** sehingga dibutuhkan penyempurnaan baik dari sisi **proses** maupun **aplikasi** pada DAK 2019;
4. Perubahan yang terlalu signifikan setiap tahun membuat **daerah sulit memahami konsep DAK**;
5. Mempermudah **koordinasi** dan **pelaksanaan** serta **kesiapan perencanaan**;
6. Mengantisipasi perubahan **Perpres Juknis DAK (revisi Perpres 123)** agar tidak signifikan.

PERTIMBANGAN DALAM PERANCANGAN BIDANG DAN MENU KEGIATAN DAK FISIK TA 2019

1. Kesesuaian bidang dengan pembagian jenis DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi);
2. Kebutuhan nasional dan dukungan prioritas nasional;
3. Dukungan untuk pemenuhan janji Presiden dan Wakil Presiden pada saat pemilihan presiden;
4. Pemilihan menu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional dengan target capaian keluaran (output) dapat tercapai dalam satu tahun (proyek kegiatan tuntas dan dapat dimanfaatkan);
5. Pengintegrasian pelaksanaan beberapa bidang terkait dengan **pendekatan program (*programmatic approach*)**, misalnya untuk program penanggulangan *Stunting*.

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK



PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

K/L Teknis

- Penilaian mengacu pada:
- data teknis usulan DAK;
 - perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L;
 - tingkat pencapaian SPM;
 - target output dan outcome:
 - jangka menengah;
 - per tahun secara nasional;
 - dari dana TP dan KP.

Bappenas

- Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:
- Data teknis Usulan DAK;
 - lokasi prioritas;
 - Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu

- Menilai satuan biaya:
- Standar Biaya;
 - Indeks kemahalan konstruksi;
 - kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

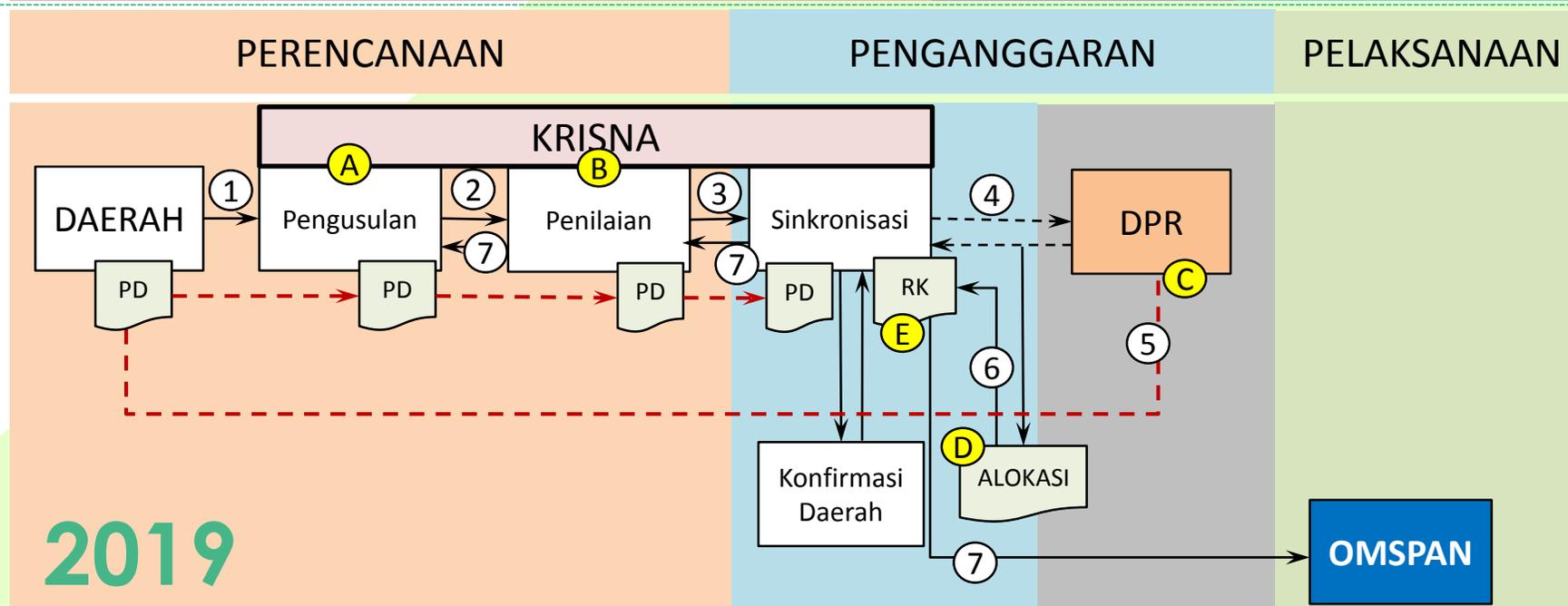
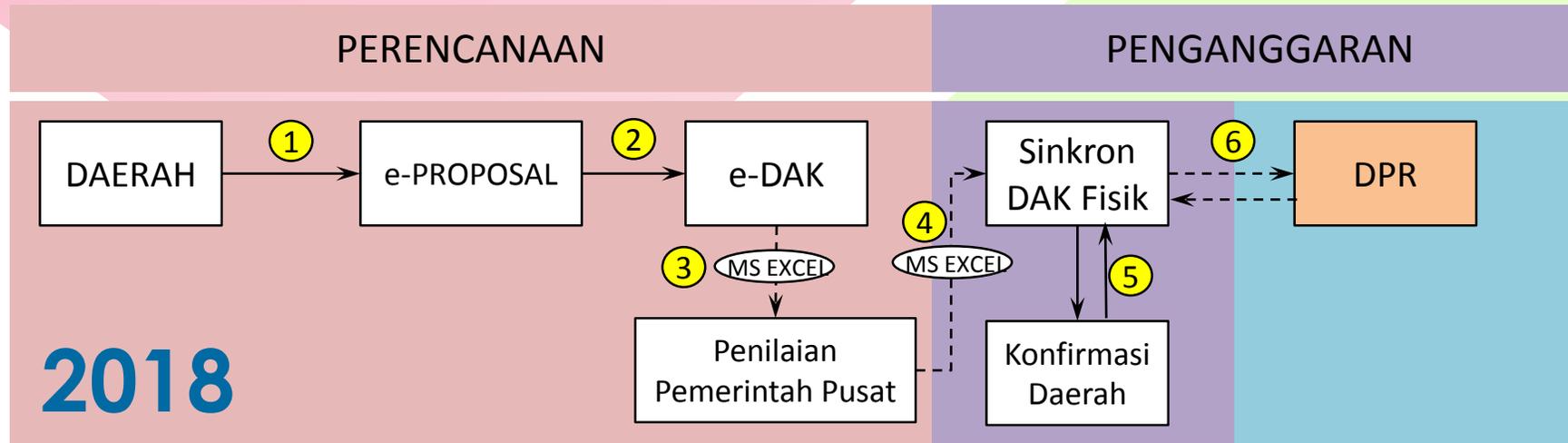
Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi

URGENSI INTEGRASI APLIKASI DAK FISIK DENGAN KRISNA

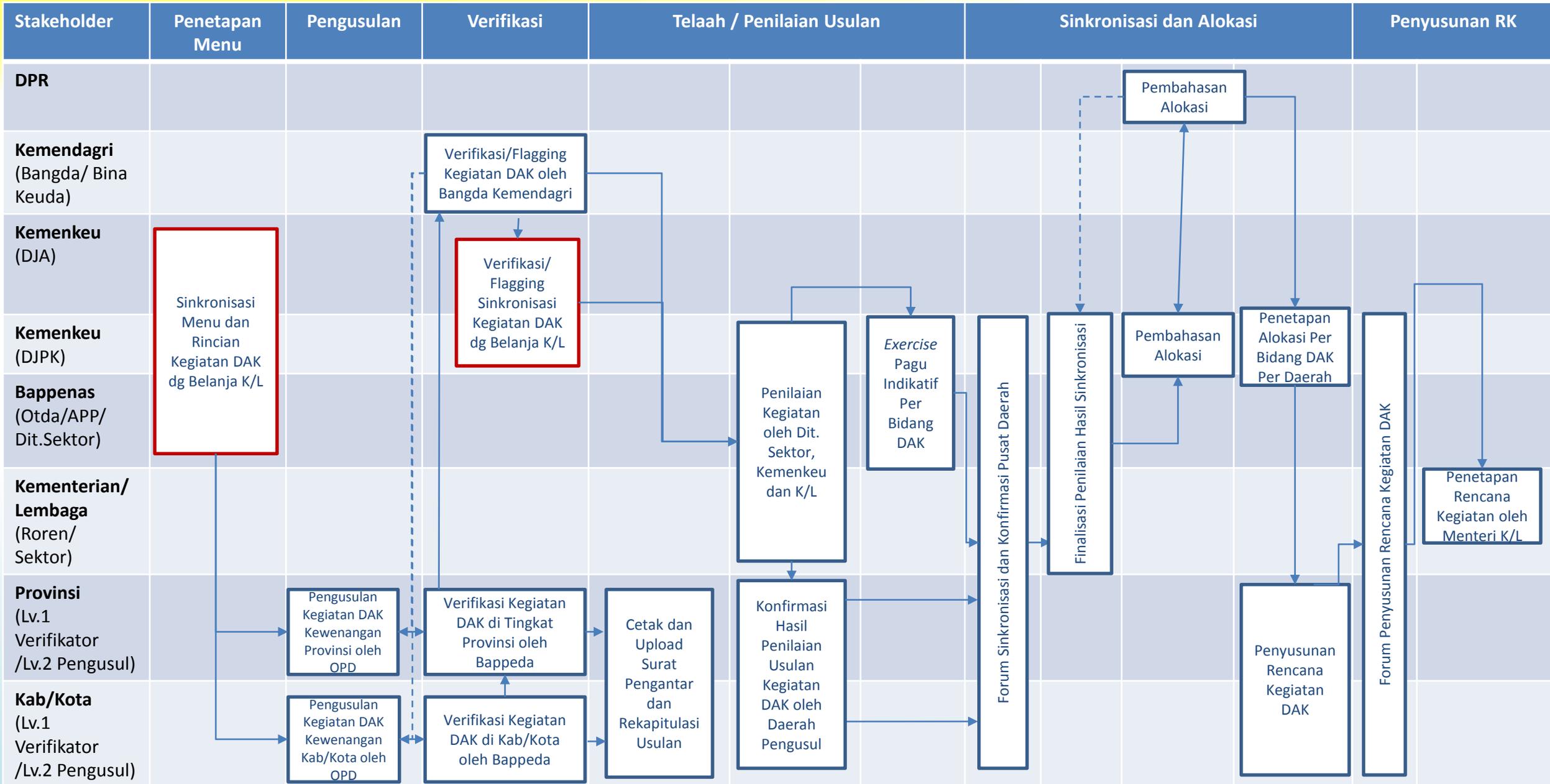
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah;
- Jenis transfer ke daerah yang harus tersinkronisasi dengan belanja pusat adalah Dana Transfer Khusus;
- Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD masih belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang mendanai urusan pusat dan sebaliknya;
- Arahkan Presiden untuk melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
- KSP telah menyampaikan surat agar aplikasi perencanaan DAK Fisik terintegrasi dengan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019



1. Menu dalam aplikasi akan disesuaikan dengan fitur **drop down list** sehingga **meminimalkan kesalahan pengisian menu** yang tidak sesuai dengan kesepakatan *Multilateral Meeting*;
2. Pengembangan **Sinkronisasi antara aplikasi E-Planning DAK dengan aplikasi serupa di K/L dan OMSPAN**, untuk mempermudah pengusulan, *data sharing*, dan penilaian usulan DAK;
3. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: **e-planning DAK-KRISNA- SINKRON menjadi SATU APLIKASI KRISNA**
4. Pengembangan Integrasi Aplikasi **E-Planning DAK dan Sinkron-DAK dengan OMSPAN** untuk digunakan sebagai **instrumen monitoring dan evaluasi DAK**.
5. Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat pemberitahuan terkait batas waktu pengusulan DAK Fisik 2019 kepada seluruh Pemerintah Daerah.

Role-Sharing dalam Proses Perencanaan DAK 2019

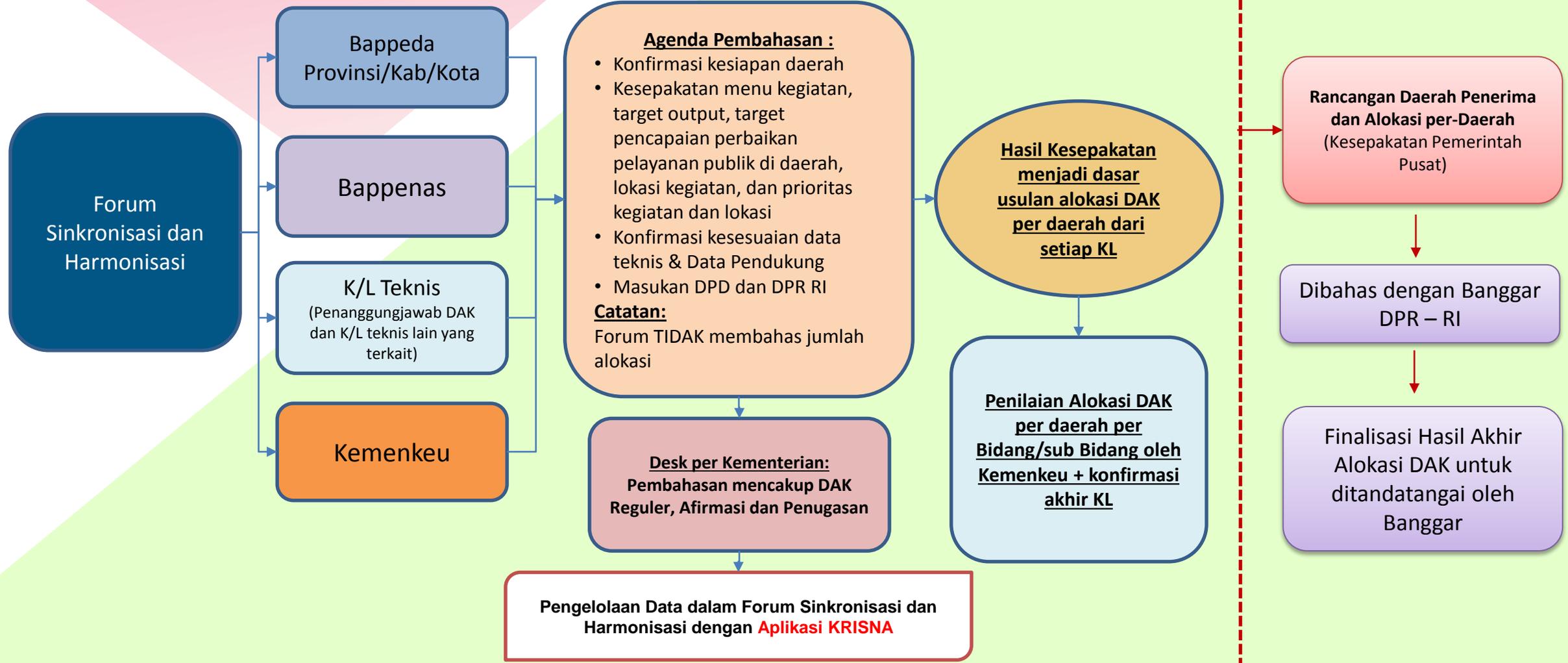


User Role dalam Aplikasi DAK 2019

USER	Input/ Edit	Submit	Flagging	Approve /Discuss	Comment / Notes	View/ Unduh/ Print	Admin (User Mgt)	Super Admin	KETERANGAN
User Role Daerah									
<i>OPD Kab/Kota</i>	X					X			
<i>Bappeda Kab/Kota</i>	X	X				X	X		+ User Management
<i>OPD Provinsi</i>	X					X			
<i>Bappeda Provinsi</i>	X	X	X		X	X	X		
<i>Lainnya (Setda – Biro Adpem, Itda, BPKAD)</i>						X			
User Role Pusat									
<i>Bangda Kemendagri</i>			X		X	X			
<i>Keuda Kemendagri</i>						X			
<i>K/L Pengampu DAK</i>				X	X	X			
<i>DJPk Kemenkeu</i>				X	X	X	X	X	
<i>DJA Kemenkeu</i>					X	X			
<i>Bappenas Sektor</i>				X	X	X			
<i>Bappenas APP, PWK</i>						X			+ Data Management
<i>Bappenas Otda, Sisdur</i>						X	X	X	

FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018

FORUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI



PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK

PERPRES PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016

RENCANA KEGIATAN



- Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis dapat diubah **maksimal satu (1) kali** dengan batas waktu perubahan maksimal **bulan MARET**.
- Maksimal di sampaikan dalam aplikasi OM SPAN tanggal **21 Juli**

FORMAT RENCANA KEGIATAN

PERPRES PERUBAHAN ATAS PERPRES 123 TAHUN 2016

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2018

DAERAH : Kota XXXX
 JENIS : Reguler
 BIDANG : Kesehatan
 PAGU
 ALOKASI Rp 8.625.000.000

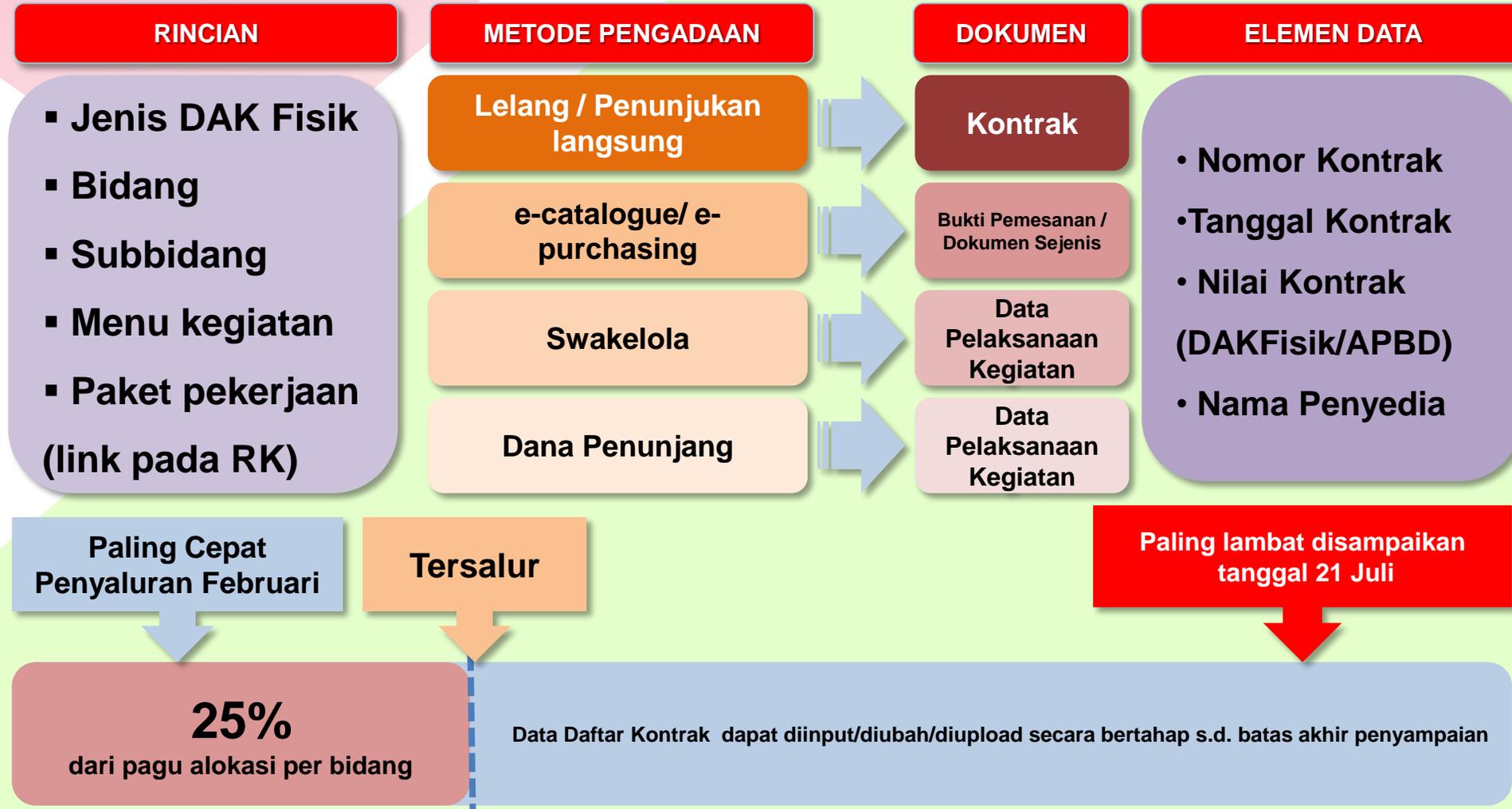
A. SUB
 BIDANG : Kesehatan Dasar

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non-Afirmasi dan pendukungnya	1.	Pembangunan Puskesmas Kec. Sukajaya	Fisik	Pelelangan	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Unit	Rp 2.500.000.000	
		2.	Pembelian Alat Kesehatan	Fisik	E-Katalog	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Paket	Rp 500.000.000	
		3.	Konsultan Pengawas	Penunjang	Penunjukan Langsung	Kec. Sukajaya, Desa Paya	1	Orang	Rp 125.000.000	
2.	Penyediaan Prasarana puskesmas Non-Afirmasi	1.	Pengadaan Sistem Informasi Puskesmas Kec. Sukakarya	Fisik	Pelelangan	Kec. Sukakarya, Desa Kota Atas	1	Paket	Rp 1.000.000.000	
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp 4.125.000.000	Rp -

PERSYARATAN PENYALURAN DAK FISIK

“USER REQUIREMENT PENGEMBANGAN OM SPAN”

DATA DAFTAR KONTRAK KEGIATAN



MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

PMK 112/PMK.07/2017 Ttg Perubahan PMK 50/PMK.07/2017

Perubahan Penyaluran

Besaran Penyaluran

Syarat:

- Perda APBD
- Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya
- Minimal Penyerapan
- Minimal Output
- Kontrak Kegiatan
- **Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL**
- Laporan nilai rencana kebutuhan dana

Penyaluran:

- Paling Cepat
- Paling Lambat

Penyampaian Dokumen Paling Lambat

2018			2017			
Penyaluran melalui KPPN setempat			Penyaluran melalui KPPN setempat			
Thp I	Thp II	Thp III	TW I	TW II	TW III	TW IV
25%	45%	*	30%	25%	25%	*
√	-	-	√	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√
-	75%	90%	-	75%	75%	90%
-	-	70%	-	-	30%	65%
√	-	-	-	√	-	-
√	-	-	-	-	-	-
-	-	√	-	√	-	-
Feb Juli	Apr Okt	Sept Des	Feb 31 Mei	Mei 8 Sep	Sep 31 Okt	Nov 31 Des
21 JULI	21 OKT	15 Des	19 Mei	31 Aug	21 Okt	15 Des



Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu s.d Rp1 Milyar:

- ✓ Sekaligus paling cepat April paling lambat Juli sebesar nilai kebutuhan
- ✓ Persyaratan:
 - perda APBD TA berjalan;
 - laporan realisasi TA sebelumnya
 - Daftar kontrak kegiatan
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli
- ✓ Laporan realisasi kegiatan T Aberjalan paling lambat November.

Penyaluran DAK Fisik yang pembayarannya tidak bisa bertahap:

- ✓ K/L menyampaikan **rekomendasi paling lambat Februari**;
- ✓ Dibahas dan ditetapkan oleh Kemenkeu;
- ✓ Disalurkan sekaligus **paling cepat Agustus** dan **paling lambat Desember**;
- ✓ Persyaratan:
 - perda APBD TA berjalan;
 - laporan realisasi TA sebelumnya
 - Daftar kontrak kegiatan
 - Berita Acara Serah Terima
- ✓ Batas penyampaian persyaratan 21 Juli (selain Berita Acara Serah Terima)

Catatan:

* sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan

A light brown map of Indonesia is centered in the background. The text 'TERIMA KASIH' is overlaid on the map in a large, bold, black font. The entire scene is framed by a dark blue rounded rectangle.

TERIMA KASIH